

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya diwujudkan dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Terkait dengan masalah akuntabilitas di Indonesia ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Berkaitan dengan administrative accountability dan profesional accountability isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah Wahyudi Kumorotomo (2010). Kenyataan tersebut bisa diketahui dari semakin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2009 jumlahnya hanya 8 dari 164 LKPD yang dilaporkan. Padahal pada tahun 2004 lalu jumlah laporan keuangan daerah yang mendapat opini terbaik berjumlah

21 laporan. Pada tahun 2005 turun menjadi 17 laporan, bahkan pada tahun 2006 merosot tajam menjadi kurang dari 10 laporan. Sehubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dari pengalaman juga menunjukkan bahwa buruknya kinerja akuntabilitas hal itu bisa dilihat dari banyaknya dana yang tidak terserap dan belum lagi banyaknya PEMDA yang kemudian menyimpan dananya daripada untuk merealisasikannya bagi masyarakat. Persoalan lain juga banyaknya alokasi dana yang diperuntukan bagi belanja aparatur daripada belanja langsung untuk rakyat.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Pengendalian atau kontrol akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo (2009). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdulah, 2005).

Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Diantara faktor-faktor tentang akuntabilitas beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi sebagai variabel independennya Aap Apriadi (2010). Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan

pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah. Namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Pony Harsanti (2008) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Faktor yang mempengaruhi antara lain kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi sebagai variabel moderating. Hasil menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan dan motivasi berpengaruh terhadap variabel dependennya. Risma Putri (2009) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasilnya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah atas akuntabilitas kinerja, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak menunjukkan adanya pengaruh. Populasi dari penelitian ini adalah semua dinas terkait di Kabupaten Klaten dengan unit analisis entitas pelaporan yaitu Kepala dinas dan kepala bagian keuangan.

Penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian Reni Yulianti (2014) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Perbedaan lain terdapat pada populasi yang digunakan. Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak

yang melakukan penyusunan anggaran di wilayah Purbalingga. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Reni Yulianti (2014) yang melakukan penelitian pada SKPD di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Purbalingga tahun 2014 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP. LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta analisis dan evaluasinya sangat penting bagi langkah upaya peningkatan

kualitas kinerja organisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut merupakan dorongan dan kebutuhan dukungan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga agar senantiasa meningkatkan kinerja sehingga akan mendukung percepatan perwujudan Daya Saing Daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Purbalingga.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat bermanfaat untuk (Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tahun 2010-2015 secara umum telah diperoleh nilai sangat baik yaitu 97,35%) Mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Purbalingga, yaitu:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Purbalingga.
2. Menjadikan Pemerintah kabupaten Purbalingga akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka
4. meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Purbalingga terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Purbalingga
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Purbalingga
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Purbalingga

C. Pembatasan Masalah

Pada Penelitian ini, batasan masalah yang di tetapkan dan telah dirumuskan agar lebih terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Pembatasan tersebut adalah:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.
2. Data dari penelitian ini diambil dari SKPD dan pihak yang terkait dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Purbalingga.
3. Penelitian ini berfokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Purbalingga
2. Untuk menguji pengaruh pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Purbalingga
3. Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Purbalingga

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek Teoritis
 - a. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis akuntabilitas instansi pemerintah daerah serta sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan

- b. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa lebih dikembangkan lebih baik lagi

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah Daerah

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi

pemerintah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami hasil kinerja nyata instansi Pemerintah Daerah dalam sebuah kesimpulan laporan akhir tahunan yang dinilai dengan 5 jenis opini Audit.

